



LAPORAN KINERJA TW II

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja TW II Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam kurun Triwulan terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Sekretariat DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami berharap, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Malili, 2 April 2025

Sekretaris DPRD,


ASWAN AZIS, S.Pi.M.Si
Pangkat: Pembina TK I
NIP. 197505162008031001

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	7
1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah.....	9
1.5 Strategi Organisasi	10
1.6 Landasan Hukum	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran	16
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.4 Perjanjian Kinerja Utama	22
2.5 Rencana Anggaran	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD KAB. Luwu Timur.....	34
3.2 Analisis Capain Kinerja	35
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja.....	90
4.3. Saran	91

BAB 1**PENDAHULUAN**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota. Dasar hukum penyusunan laporan Kinerja TW II adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun laporan Kinerja Triwulan II.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

1.1 Tugas Dan Fungsi

Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang keedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timur Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Fungsi :

1. Penyelenggaraan Adminitrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;

1. **Sekretaris DPRD**, Menyelenggarakan administraskesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Bagian Umum dan Keuangan**, dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan fungsi:

1. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup dibidang umum dan bidang keuangan;
5. melaksanakan kebijakan dibidang Umum dan bidang Keuangan;
6. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Umum dan Keuangan;
7. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan bidang Keuangan;
8. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang umum dan bidang keuangan;
9. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang umum dan bidang keuangan;
10. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
11. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
12. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Program dan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyusun bahan perencanaan

4. Subbagian Umum, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
7. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyusun administrasi kepegawaian;
8. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

5. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang persidangan dan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

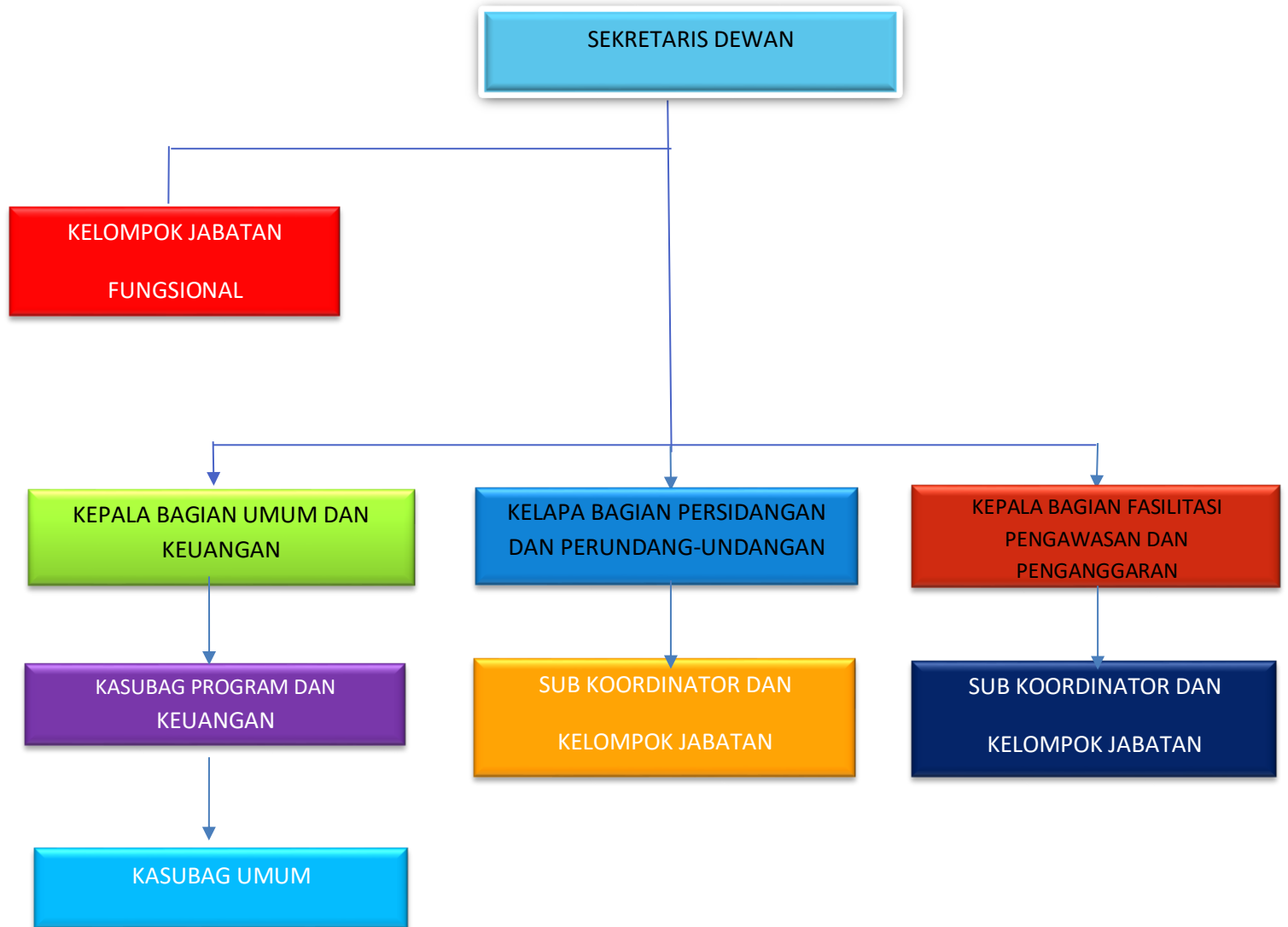
1. menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Persidangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang persidangan dan bidang perundang-undangan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang persidangan dan perundang-undangan;
7. melaksanakan kajian perundang-undangan;
8. melaksanakan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;

9. melaksanakan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan persidangan dan melaksanakan penyusunan risalah;

6. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
3. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
4. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Fasilitasi Penganggaran serta bidang Fasilitasi Pengawasan;
5. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
6. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
7. melaksanakan penatausahaan keuangan;
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

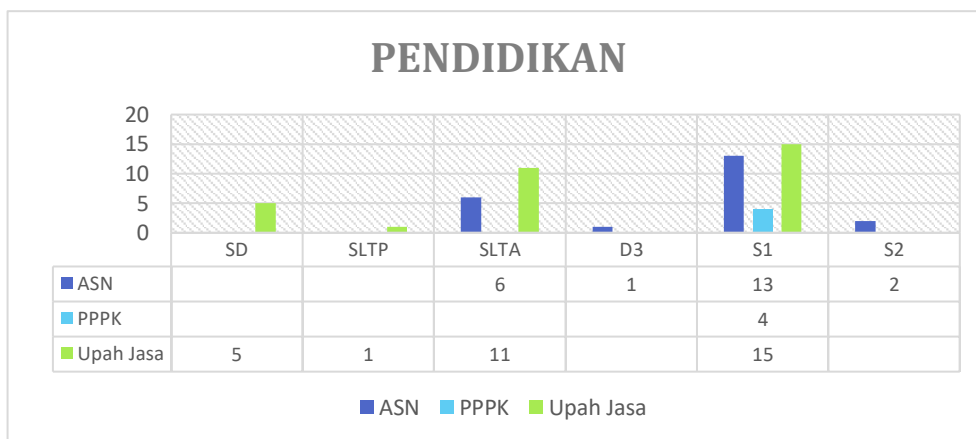
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



1.2 Sumber Daya Manusia

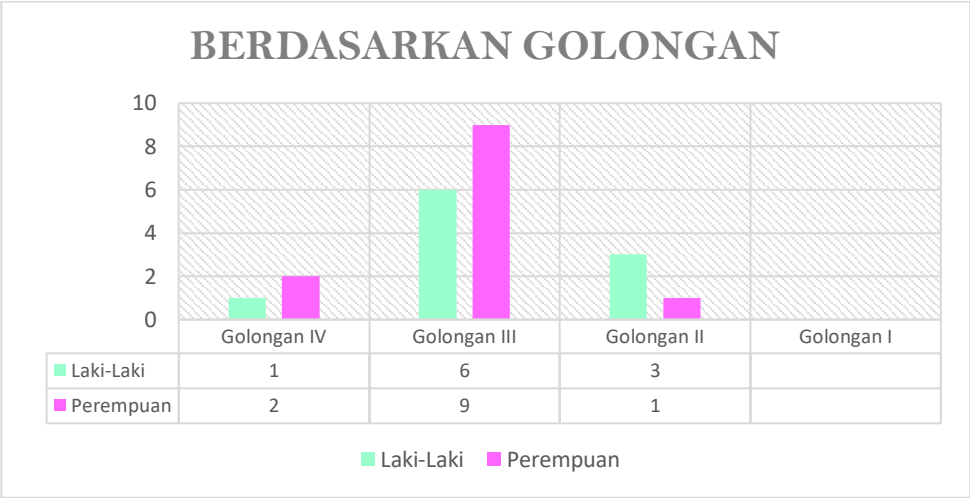
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 51 Orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 23, PPPK 4 Orang dan Tenaga 18 Orang (Tenaga Administrasi 10 Orang, Cleaning Service 21 Orang, Sopir 5 Orang). Struktur tingkat Pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut.

Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



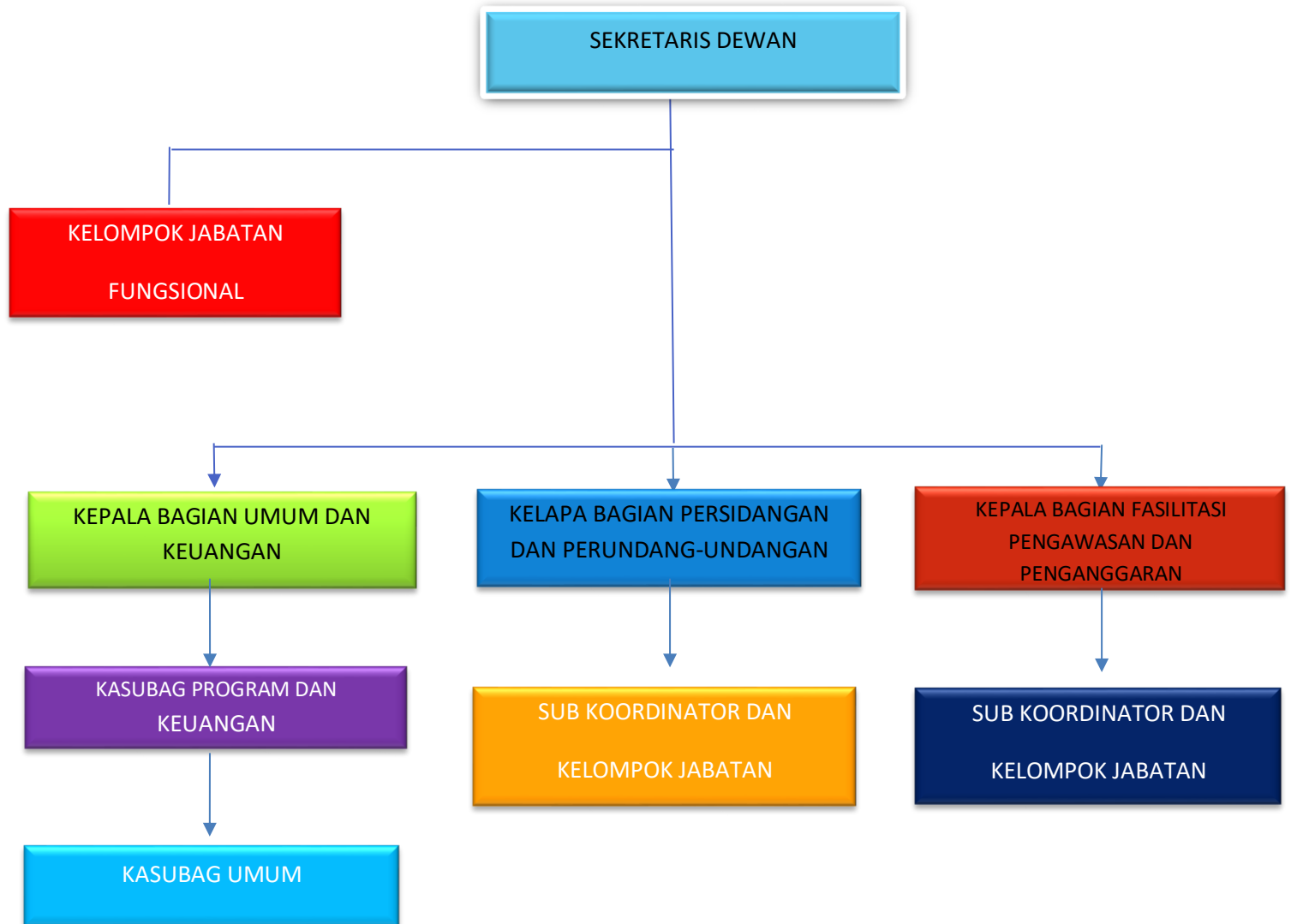
Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, Januari 2025

Grafik. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat
DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



1.3 Aspek Strategi Organisasi

Aspek strategi organisasi menggambarkan bagaimana Sekretariat DPRD merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan). Strategi ini berfungsi sebagai “peta jalan” agar seluruh sumber daya (SDM, keuangan, sarana prasarana) dapat digunakan secara efektif.

Sekretariat DPRD telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatan kinerja organisasi. Untuk aspek internal, Sekretariat DPRD melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan tugas, bimbingan teknis dan sosialisasi.

1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Belum optimalnya sinergi antara Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dalam mendukung tugas kedewanan.
2. Masih perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi, administrasi persidangan, dan manajemen keuangan.
3. Rencana Kerja yang telah ditentukan selalu berubah tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Koordinasi lintas bagian dalam sekretariat kadang belum efektif, sehingga mempengaruhi kelancaran dukungan kegiatan DPRD.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab. I - Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu Target Kinerja 2021-2026.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang

BAB 2**PERENCANAAN
KINERJA****2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Sekretariat DPRD Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi**1. Pernyataan Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung

penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu : **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**. Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Berkelanjutan”, “Lebih Maju”, dan “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”	“Berkelanjutan”	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
	“Lebih Maju”	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

	"Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan
--	---------------------------------------	--

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **misi ke-4 (Empat)**, dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Misi Ke-4 RPJMD : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sasaran 8 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabarab dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkakan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

Misi ke 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD.

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik.

Indikator : a) Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dengan target 100%.
b) Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Target 100%

Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Sekretariat DPRD

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Indikator : Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan Indikator Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda dan Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Sekretariat DPRD sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI	Target Kinerja pada Tahun				
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	80%	90%	90%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	100%	100%	100%

2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Pemerintahan Yang Lebih Baik	Rata-rata capaian program PD	64,71	75	75	80	80	85
----	--	------------------------------	------------------------------	-------	----	----	----	----	----

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI	Target Kinerja pada Tahun				
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	72,27%	90%	90%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	83,33%	90%	90%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	64,71	75	75	80	80	85

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja serta anggaran.

Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	80

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nomor DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 mengelola dana sebesar Rp. Rp. **41.084.435.252,00** terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. **40.093.820.252,00** dan Belanja Modal Rp. **990.615.000,00**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	29.076.482.802	APBD
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.007.952.450	APBD
	JUMLAH	41.084.435.252,	

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 8
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapan

NO	SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesektarian Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatkan fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pemebentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD. Membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan Penganggaran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : Tahun 2021 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian

		kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan
1	100%	✓ Target Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2023 capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda 88,89% atau 15 Ranperda yang di targetkan dan terealisasi 12 Ranperda menjadi Perda. Persentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda di tahun 2024 di targetkan 100% dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%.
2.	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD , baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.
2.	100 %	Target Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 Sekretariat DPRD telah Mencapai Target 100%. Dengan Rekomendasi yang telah di tindaklanjuti
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah

		dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja
1.	Nilai SAKIP	Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD
1.	80	Target yang ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, tahun 2024 capaian Lakip hasil evaluasi Inspektorat untuk DPRD adalah 70,80 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten maka pada tahun 2025 Sekrtariat DPRD Menurun target capaiannya, dikamakan adanya perubahan indicator sekretariat DPRD.

BAB 3**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja TW II Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Pepres No 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa Instansi lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Sekretariat DPRD selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja TW II (LKJ) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 9
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan

2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Seretariat DPRD Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
TW II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	25%	25%	100%	T

		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	25%	23%	93,33%	ST
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai	80	76,85	102,47	ST

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (Indikator) yang diperjanjikan di Tahun 2025,

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS I

“Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik”

INDIKATOR I

” Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda”

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	25%	25%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja			80% (Tinggi)		

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian Presentase Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik Pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan	Persen	25%	25	80%

Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda				
Rata-rata Capaian Kinerja	100% (Tinggi)			

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**, target yang ditetapkan di TW II 25 % dan terealisasi 25%, dimana Jumlah Ranperda yang telah dibahas ditargetkan di TW II sebanyak 5 ranperda dan terealisasi 5 ranperda. Dan masih dalam Tahap Pengakajian di TW II . Ada pun dari ke 5 ranperda yang diusulkan sebagai berikut :

- a. Inovasi Daerah
- b. RPJMD
- c. Perubahan tentang Desa
- d. Perubahan tentang Perangkat Desa
- e. Perubahan BPD

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2021 -2025)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2021 – 2025) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan	Target Tahun 2026
-----------	--	-------------------

Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik						
Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Triwulan II Tahun	Target	Realisasi	Capaian	80%
	Persen	2021	77,27	80,80	111,80%	
Persentase		2022	90	85,19	98,77%	
Fasilitasi		2023	90	88,89	98,77%	
Pembahasan		2024	100	69,23	69,23%	
Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda		2025	80	25,00	27,78%	

- a. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, ini menunjukkan bahwa pada tahun berjalan, proses fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari total rancangan Perda yang diajukan untuk difasilitasi sebanyak 11 ranperda dan di tetapkan menjadi perda sebanyak 8, tercapai persentase fasilitasi sebesar 72,27 atau capaian sebesar **80,80%**. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rancangan Perda yang difasilitasi telah berhasil melewati tahapan evaluasi dan pembahasan secara efektif, sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Meskipun demikian, masih terdapat rancangan Peraturan daerah yang belum ditetapkan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum lengkapnya dokumen pendukung, perlunya penyempurnaan substansi, atau masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.
- b. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, menunjukkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menunjukkan capaian yang baik dalam memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah

(Perda). Dari seluruh rancangan Perda yang diajukan dan difasilitasi, tercapai persentase keberhasilan sebesar 85,19% dengan capaian 94,66%, dari total rancangan perda yang diajukan sebanyak 27 ranperda dan ditetapkan menjadi perda sebanyak 23 perda, jumlah Perda yang berhasil ditetapkan setelah melalui proses fasilitasi dan pembahasan bersama DPRD. Untuk ke depannya, diperlukan langkah strategis dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi perencanaan program legislasi daerah (Prolegda), serta percepatan mekanisme fasilitasi agar seluruh rancangan Perda dapat ditetapkan secara tepat waktu.

- c. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, Sepanjang periode pelaporan, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan peran fasilitatif dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan capaian sebesar **80%** dengan capaian sebesar 88,89% dari total ranperda 15 dan yang ditetapkan menjadi perda sebanyak 12 Perda setelah melalui pembahasan bersama DPRD dan pihak terkait. Faktor penghambat umumnya berkaitan dengan kebutuhan revisi substansi, perpanjangan proses pembahasan, atau perlunya klarifikasi lebih lanjut terhadap hasil fasilitasi. Ke depan, diperlukan peningkatan sinergi dan pemantauan yang lebih intensif untuk memastikan seluruh produk hukum daerah dapat ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, target yang ditetapkan 100 % dan terealisasi 69,23%, dimana Jumlah fasilitasi Pembahasan

ranperda yang ditetapkan menjadi perda ditargetkan di thn 2024 sebanyak 13 ranperda. Dikarenakan, adanya kelebihan penentuan target ranperda yang seharusnya 12 ranperda saja. Dan dari 12 ranperda yang telah terfasilitasi pembahasannya hanya 9 Ranperda yang di teapkan menjadi Perda. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan*. Faktor penghambat umumnya berkaitan dengan pencapaian tersebut dikarenakan , Proses pembahasannya dilanjutkan ke tahun 2025, Ranperda ini ditarik sesuai surat dari Bupati Nomor 100.32/0220/Bup tanggal 7 November 2024 dan masih proses permintaan Nomor Registrasi ke Biro Hukum oleh Bagian Hukum

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan II Tahun 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025		
	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	25%	25%	80%

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Analisis perbandingan capaian indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda di Kabupaten Luwu Timur Triwulan II tahun 2025 dengan target nasional, target Provinsi Sulawesi Selatan, dan capaian kabupaten/kota lain yang relevan.

Tabel 15
Capaian Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan capaian secara nasional/provinsi/kabupaten)

Wilayah	Persentase Desa Mandiri	Keterangan
Target Nasional	$\geq 85\%$	target yang ditetapkan melalui RPJMN adalah minimal 85% Ranperda prioritas dapat difasilitasi hingga ditetapkan menjadi Perda . Di tingkat provinsi, target yang ditetapkan berkisar 75–85% , sementara di tingkat kabupaten/kota umumnya berada pada kisaran 70–80% sesuai dengan kapasitas sumber daya dan kompleksitas regulasi di
Provinsi Sulawesi Selatan	75–85%	Target disesuaikan dengan kapasitas daerah. Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum berperan sebagai fasilitator harmonisasi dan evaluasi Ranperda kabupaten/kota
Kabupaten/Kota	70–80%	Target realistis sesuai kemampuan SDM dan kompleksitas Ranperda di daerah. Variasi capaian antar daerah cukup tinggi, tergantung jumlah Ranperda dalam Prolegda.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

✓ **Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran**

- a. Dokumen perencanaan (Propemperda) disusun dengan baik, sesuai kebutuhan daerah, serta melalui koordinasi intensif dengan perangkat daerah;
- b. Terselenggaranya rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif secara rutin sehingga mempercepat fasilitasi pembahasan.
- c. Adanya tenaga hukum dan staf sekretariat yang memahami teknis penyusunan naskah akademik dan pembahasan ranperda.
- d. Alokasi anggaran memadai untuk kegiatan fasilitasi, konsultasi, hingga harmonisasi.

✓ **Hambatan/Kendala**

- a. Perangkat daerah pengusul sering terlambat menyerahkan dokumen atau naskah akademik yang lengkap
- b. Terdapat Ranperda yang tidak sesuai dengan prioritas nasional/daerah atau tumpang tindih dengan regulasi di atasnya.
- c. Perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif menghambat percepatan penetapan.
- d. Adanya Ranperda yang direncanakan ditahun ini tetapi menyebrang ditahun depan.

✓ **Solusi**

- a. Menyusun Propemperda lebih awal dan berbasis kebutuhan nyata serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Membentuk tim koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan dokumen ranperda siap sebelum difasilitasi.
- c. Menetapkan jadwal pembahasan yang ketat dan melakukan evaluasi bulanan terhadap progres ranperda.
- d. Membangun komunikasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait jika terjadi perubahan regulasi, serta pendekatan politik yang konstruktif untuk memperlancar pembahasan.

✓ **Efektivitas Pelaksanaan Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Program Sekretariat DPRD disusun selaras dengan visi, misi, tujuan, dan

sasaran OPD (Sekretariat DPRD), Fokus utama yaitu mendukung kelancaran tugas DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Efektivitas terlihat dari seberapa jauh program mampu memberikan dukungan administratif, keuangan, dan fasilitasi rapat/pembahasan untuk memperkuat kinerja DPRD.

Adapun capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sebagian besar indikator kinerja program (misalnya: fasilitasi rapat paripurna, pembahasan ranperda, penyusunan dokumen keuangan, pelayanan administrasi) tercapai
2. Fasilitasi rapat, perjalanan dinas, serta layanan administrasi berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan anggota DPRD
3. Program benar-benar menunjang tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD, yaitu memberikan pelayanan prima dan mendukung kelancaran fungsi DPRD.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

✓ Efisiensi Anggaran

- a. Anggaran digunakan tepat sasaran pada kegiatan prioritas (fasilitasi rapat, pembahasan ranperda, administrasi keuangan).
- b. Adanya Efisiensi Pepres no 1 thn 2025 tanpa mengurangi kualitas layanan, misalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk rapat/administrasi.
- c. Realisasi anggaran sejalan dengan target kinerja → menunjukkan value for money (hasil sebanding dengan biaya yang dikeluarkan).

✓ Efisiensi Sumber Daya

- a. Koordinasi lintas bagian dalam sekretariat berjalan efektif sehingga beban kerja terbagi dengan baik.
- b. Sarana dan prasarana (ruang rapat, peralatan) dimanfaatkan optimal untuk menunjang kegiatan DPRD.

✓ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 16

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	8% (- Ranperda realisasi - ranperda) =8%	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislati yang Fasilitasi	25%	25%	100%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2024, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2025, namun TW III

Tabel 17

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%	66,50%	33,50%

- Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 66,50%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 33,50%. Adapun

- Persentase efisiensi biaya = $100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$
 $= 100\% - \left(\frac{2.714.503.714}{4.081.911.155} \times 100\% \right)$
 $= 100\% - 66,50\%$
 $= 33,50\%$

Indikator 2 : Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti TW II Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Capaian capaian Persentase Rekomendasi DPRD
Pada Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
1	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	25%	25	100%

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**, target TW II yang ditetapkan 25% dan terealisasi 25% dengan capaian 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada TW II di Tahun 2025.

Capaian Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan

tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19

Capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
Target Terhadap Realisasi selama 5 (Lima) Tahun
(2021 – 2025)

Indikator	Satuan	Tahun	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%
		2024	100%	100%	100%
		2025	100%	100%	100%

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD/Renstra (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20

Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi TW II Tahun 2025	Presentase Capaian Kinerja
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	25%	25%	100%

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Sekretariat DPRD dengan target dan realisasi standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Standar Nasional	
				Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%	-	-

Pada Sekretariat DPRD, sasaran sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✓ **Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran**
 - a. Rekomendasi yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga lebih mudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
 - b. Terdapat mekanisme komunikasi yang baik antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan

perangkat daerah penerima rekomendasi.

- c. Tingginya komitmen OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja.
- d. mekanisme pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi oleh Sekretariat DPRD.

✓ **Hambatan/Kendala**

- a. Minim koordinasi tindak lanjut.
- b. Fungsi pengawasan DPRD tidak optimal.

✓ **Solusi**

- a. Membentuk forum koordinasi berkala antara DPRD, Sekretariat DPRD, dan OPD penerima rekomendasi untuk memastikan tindak lanjut berjalan.
- b. Sekretariat DPRD dapat memberikan dukungan administrasi dan koordinasi agar OPD lebih mudah dalam menindaklanjuti rekomendasi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 21

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi,	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100% (1 target di tw II Pembahasan Kebijakan Anggaran realisasi 1) =100%	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Kegiatan Legislasi yang Fasilitasi	25%	25%	100%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2024, program ini akan tetap

Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik								dilaksanakan pada tahun 2025
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

- a) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Indikator 2 : **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- b) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 yaitu :

1. Melaksanakan pembahasan Anggaran tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tentukan.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.366.000.700,- dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2025 untuk mencapai target indikator kinerja **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**, terealisasi sebesar Rp. 3.493.352.079,- , sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{3.493.352.079}{5.366.000.700} \times 100\%$$

$$= 100\% - 34,90\%$$

$$= 27,93\% \text{ Efisiensi Anggaran}$$

SASARAN STRATEGIS II

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD”

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip (n-1)	Nilai	75	70,80	94,4
Rata-rata Capaian Kinerja			94,4		

Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2024

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD**” berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja NILAI SAKIP (n-1)

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 23

**Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai AKIP Perangkat Daerah Pada Triwulan II Tahun 2025**

Sasaran II		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan II Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP Perangkat Daerah (n-1)	Nilai	75	69,80	69,80%

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah '**Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat**'.

Target Indikator Sasaran Triwulan I Tahun 2025 adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah 69,80 (B), namun realisasi 69,80 belum dapat diliris didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan I.

Hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 dengan Nomor 700.1.2.1/225/IV/ITKAB Tanggal 20 Juni 2025 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 69,80 dengan kategori B, realisasi tersebut dibawah target yang direncanakan.

Adapun rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 24

**Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LKj Triwulan I
Sekretariat DPRD**

OPD	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00
	Pengukuran Kinerja	30.00	19.50
	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	15.50
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		69.80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

2. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2021-2025)**

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2019-2023), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 25

**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tiwulan II
pada tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori	Capaian Kinerja
Nilai AKIP	Nilai	2021	65.00	64.71	B	99.55
		2022	75.00	71.10	BB	94.80
		2023	75.00	76.85	BB	102.47
		2024	80.00	70.80	BB	94,4
		2025	75	69,80	B	69,80

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan mempertahankan realisasi nilai direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Selaraskan indikator kinerja kepala bidang, kasubid dalam PK dengan indikator kinerja dalam rencana aksi dan SKP.
- b) Agar kepala bidang, kasubid dan staf membuat rencana aksi sesuai dengan perjanjian kinerja.
- c) Agar kepala OPD melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang berdasarkan target rencana aksi disertai dengan rekomendasi.
- d) Agar kepala bidang, kasubid dan staf merumuskan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi
- e) Sosialisasikan seluruh informasi dalam laporan kinerja keseluruhan staf dari eselon 3, eselon 4 sampai stafjangan hanya dipusat perencanaan saja.
- f) Lakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang (dari staf ke seksi- Seksi ke bidang - Bidang ke OPD) sebelum laporan kinerja OPD disusun.
- g) Melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja OPD

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Tabel 26
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II Tahun 2025
Terhadap Jangka Menengah (2021 – 2025)

Sasaran II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2025	Realisasi sampai dengan tahun 2025		

Nilai AKIP	75*	69,80*	80	69,80%
------------	-----	--------	----	--------

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel diatas tersebut, terdapat perbandingan capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 yaitu 69,80 (B) walaupun belum mencapai target jangka menengah. Hal ini dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan pendampingan/coaching clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemerintah Daerah.

Dampaknya pelaksanaan coaching clinic untuk penguatan AKIP yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung AKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LKj Triwulan I Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah ditindaklanjuti oleh OPD, diantaranya yaitu :

- Reviu Dokumen Renstra
- Perbaikan Renja sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017
- Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi definisi operasional
- Perbaikan Dokumen LKj sesuai sistematika Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
- Perbaikan Dokumen IKU dengan definisi operasional dan formulasi

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Belum Ada

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

✓ Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
- Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari evaluasi kinerja triwulan lingkup bidang
- Mencermati kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya rill cost
- Koordinas yang optimal dengan PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

✓ Hambatan/Kendala

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik

namun belum maksimal

- b. Evaluasi kinerja hanya bersifat administratif dan tidak menjadi dasar perbaikan
- c. Pengisian formulir evaluasi kinerja yang belum optimal
- d. Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward
- e. Adanya Inpres No.1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran

✓ **Solusi**

- a. Memaksimal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
- b. Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- c. Penetapan *person in charge* untuk setiap indikator sasaran
- d. Terkait regulasi penetapan punishment and reward agar dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan untuk dijadikan sebagai payung hukum
- e. Melakukan efisiensi anggaran bagi kegiatan yang tidak yang tidak secara langsung mendukung sasaran strategis

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

✓ **Efisiensi Anggaran**

- a. Mengoptimalkan **pelatihan online/webinar** dibandingkan pelatihan luar kota yang lebih mahal.

✓ **Efisiensi Sumber Daya**

- a. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

✓ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel 27
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran II	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 202	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	69,80*	69,80%	29.076.482.802	16 408 061.105	56.43%
---	-------------	----	--------	--------	----------------	----------------	--------

Tabel 26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II	Indikator Kinerja			% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2			3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	AKIP	Perangkat Daerah	69,80%	56,43%	13,37%

Pencapaian sasaran pendukung target sebesar 100.% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 56,43%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 13,37%. Adapun perhitungan persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= 100\% - \frac{\text{Jumlah Realisasi Biaya}}{\text{Jumlah Alokasi Biaya}} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{16.408.061.105}{29.076.482.802} \times 100\% \\
 &= 69,80\% - 56,43\% \\
 &= \mathbf{13,37\% \text{ Efisiensi Anggaran}}
 \end{aligned}$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan.**

Target 75 % dan realisasi 69,80 % dengan capaian kinerja 69,80 %, dan menyerap anggaran sebesar 53,43%,- secara keseluruhan.

✓ **Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung**

Tabel 27
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi tahun 2025	Capaian (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dok	3 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dok	0 Dok	0,00%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Org	27 org	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	4 Lap	4 Lap	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1 Lap	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Kepegawaian	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat	100%	100%	100%

		Perangkat Daerah	Daerah			
a.	Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	5 Dok	100%
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	5 org	100%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dok	3 Dok	100%
f.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu yang difasilitasi kunjungannya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lap	2 Lap	100%
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Lap	48 Lap	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	0,00%	0,00%	0,00%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	0,00%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	100%
b.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan Listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	12 Lap	100%

		umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	yang Disediakan			
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	11 unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Tersedianya Barang Milik daerah Yang Diasuransikan	Jumlah Barang Milik daerah Yang Diasuransikan	6 Unit	6 Unit	100%
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3 unit	3 unit	100%
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor Atau Bnagunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan prasarana Gedung Kantor Atau Bnagunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%
9	Kegiatan Layanan Keuangan Kesejahtaraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan Kesejahtaraan DPRD	Persentase Rata-Rata Capaian Keuangan Dan Kesejahtraan DPRD	100%	100%	100%
a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD Tepat Waktu	Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan	35 Orang	35 Orang	100%
b	Penyediaan pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian Dinas Dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan	35 Paket	35 Paket	100%
c	Pelaksanaan Medical Chek-UP	Tersedianya Pelaksanaan Medical Chek-UP	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP	35 Orang	16 Orang	45,71%

1.3 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 41.084.435.252,-** (*Empat Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp. 22.780.089.202,-** belanja barang dan jasa **Rp. 17.313.731.050,-** belanja modal Gedung **Rp. 651.600.000,-**. Dan belanja modal peralatan dan mesin **Rp 339.015.000,-**

Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan 2 program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun target dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28
Belanja Daerah Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025	
			(Rp.)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.076.482.802	16.408.061.105,00	56,43
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.252.400	18.276.600	30,85
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.300.350	12.090.700	30,76
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.308.000,00	1.083.450	20,41
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.429.350	1.088.450	24,57
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.214.700	4.014.000	39,30
02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	4.011.137.480	2.085.259.631	51,99
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.248.880	2.044.143.831	52,06
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	84.888.600	41.115.800	48,44

03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.602.850	18.539.050	62,63
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.602.850	18.539.050	62,63
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.556.950	107.720.000	23,34
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	247.470.000	98.570.000	39,83
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	214.086.950	9.150.000	4,27
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.137.971.950	525.787.596	46,20
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.413.000	19.744.000	55,75
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.200.150		-
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.100.000	2.500.000	35,21
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.755.000	55.389.300	41,10
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.383.000	13.599.950	39,55
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	255.100.000	141.500.000	55,47

16	Fasilitas Kunjungan Tamu	190.630.400	81.296.181	42,65
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.390.400	211.758.165	59,58
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	769.414.850	-	-
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	651.600.000		-
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.814.850		-
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.966.000	505.816.316	55,04
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.926.000	31.630.485	72,01
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	500.040.000	276.685.831	55,33
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.000.000	197.500.000	52,67
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.100.000	207.692.342	35,86
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.700.000	84.453.842	51,59

26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.400.000	29.480.000	32,98
27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000		-
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.000.000	45.682.500	31,08
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	48.076.000	38,46
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.757.080.322	12.319.999.725	62,36
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.853.840.322	11.979.816.425	63,54
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	693.240.000	340.183.300	49,07
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000		-
10	Layanan Administrasi DPRD	1.352.400.000	618.969.845	45,77
33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.352.400.000	618.969.845	45,77
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.007.952.450	6.207.855.793	51,70
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.043.504.800	805.439.177	77,19

35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	289.337.200	142.334.754	49,19
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	754.167.600	663.104.423	87,93
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	734.948.200	129.976.300	17,69
37	Pembahasan KUA dan PPAS	67.169.350		-
38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	68.815.400		-
39	Pembahasan APBD	192.714.200		-
40	Pembahasan APBD Perubahan	208.555.450	12.089.960	5,80
41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	197.693.800	117.886.340	59,63
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.355.248.650	2.135.446.029	90,67
42	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	633.611.700	606.509.780	95,72
43	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	686.540.950	662.589.222	96,51
44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	617.985.800	582.575.191	94,27
45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	203.166.900	141.162.386	69,48
46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	213.943.300	142.609.450	66,66
04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.283.453.650	794.198.969	61,88
47	Pendalaman Tugas DPRD	950.814.400	640.792.969	67,39
48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	118.836.000	30.906.000	26,01
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	122.500.000	58,33

50	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.803.250		-
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.580.337.800	1.206.310.250	33,69
51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.547.700	14.594.600	59,45
52	Pelaksanaan Reses	3.555.790.100	1.191.715.650	33,51
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	24.899.500	21.619.500	86,83
53	Pengawasan Kode Etik DPRD	24.899.500	21.619.500	86,83
07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.481.409.000	228.074.120	15,40
54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.481.409.000	228.074.120	15,40
08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.504.150.850	886.791.448	58,96
55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.463.019.850	858.867.448,00	58,71
56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	41.131.000	27.924.000,00	67,89
	Jumlah	41.084.435.252	22.615.916.898,00	55,05

✓ **Permasalahan dan Solusi tentang Penyerapan Anggaran**

Tabel 39

Permasalahan dan Solusi TW II 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu target 2 Dokumen dan terrealisasi 1 dokumen atau 100%	Jumlah Anggaran yang ada pada TW II sebesar Rp. 18.200.000,- Realisasi Keuangan Rp 10.590.700 atau 58,19% (Terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Coverdan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yg belum terrealisasi)	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW III
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)		Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW III
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)		Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW III
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Target 3 Dokumen Terealisasi 3 dokumen atau 100 %	Jumlah anggaran TW II Rp.6.534.700,- terealisasi sebesar Rp 4.014.000,-, atau 61,43% . Terdapat Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat yg belum terrealisasi	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW III
2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah			

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Dengan target 27 Orang dan terealisasi 27 Orang atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp.2.869.374.260,50,- terealisasi sebesar Rp 1.733.713.557,-, atau 60,42%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target 3 laporan dan terealisasi 3 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp39.794.000,- terealisasi sebesar Rp34.435.800,-, atau 86,54%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun. Target 1 dokumen terealisasi 1 dok atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 15.442.850,- terealisasi sebesar Rp 13.758.800,-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang Dimutahirkan Target 1 dok. Realisasi 1 dok atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 104.900.000,- terealisasi sebesar Rp 93.570.000,- atau 89,20%.	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang) Target 22 orang dan terealisasi 2 Orang atau 9,09%. Ini dikarenakan Penggunaan anggaran bimtek disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	Jumlah anggaran TW II Rp 189.086.950,- terealisasi sebesar 9.150.000 atau 4,84%. Ini dikarenakan Penggunaan anggaran bimtek disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW III
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target 9 Jenis realisasi 9 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 18.013.000,- terealisasi sebesar Rp 11.434.000,- atau 63,48%. di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor , Mesjid dan 3 Rujab Pimpinan DPRD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan .Target 5 Jenis. Belum terealisasi karena dilaksanakan di TW III		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target 2 Jenis terealisasi 2 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 4.050.000- terealisasi sebesar Rp1.750.000,- atau 43,21%. di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp2.000.000, yang disedian setiap bulannya 2 kali dan terealisasi 1 kali setiap bulan.	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 2 jenis realisasi 2 jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 85 397 000,- terealisasi sebesar Rp 41.784.300,- atau 48,93%. Di karenakan terdapat rincian objek belanja yang tdk terealisasi yaitu Belanja Sewa Mebel, Belanja Sewa Peralatan Studio Audio dan Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya yang disediakan untuk hari raya keagamaan	akan melakukan pergeseran anggaran pada saat di perubahan anggaran dan mengalokasikan anggran tersebut di kegiatan yang membutuhkan anggaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan. Target 2 Jenis realisasi 2 jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp20.000.000,- terealisasi sebesar Rp 11.081.950,- atau 59,08%. di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan (Belanja Fotocopy)	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan. Target 3 Laporan realisasi 3 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 185.000.000,- terealisasi sebesar Rp 101.500.000,- atau 54,86%.	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Target 3 Laporan terealisasi 3 laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 106.426.000,- terealisasi sebesar Rp 161.342.811,- atau 59,08%.	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah anggaran TW II Rp 260.890.400- terealisasi sebesar Rp 161.342.811,- atau 61,84%.	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan (Unit) target 4 Unit dan belum terealisasi karena		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan. Target 4 Unit belum terealisasi, karena		
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda. Target 3 Laporan dan Terealisasi 3 Laporan atau 100 %	Jumlah anggaran TW II Rp 26.426.200,- terealisasi sebesar Rp22.069.000,- atau 83,51%.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan. Target 9 Rek dan terealisasi 9 rek atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp250.020.000,- terealisasi sebesar Rp 215.223.443,- . atau 86,08%.	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan. Target 21 Orang dan terealisasi 21 Orang atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 156.250.000,- terealisasi sebesar Rp 143.750.000,- atau 92,80%.	

08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Target 3 Unit dan terealisasi 3 Unit atau 36.36%	Jumlah anggaran TW II Rp 130.000.000- terealisasi sebesar Rp 57.292.948,- atau 44,07%. dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW III	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW III
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target 47 unit realisasi 30 Unit atau 63,82	Jumlah anggaran TW II Rp 51.060.000- terealisasi sebesar Rp 22.890.000,- atau 44,83%. di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Barang Milik daerah Yang Diasuransikan. Target 6 Unit dan belum terealisasi karena dilaksanakan di TW IV		Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW IV
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit realisasi 3 Unit atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 114.500.000,- terealisasi sebesar Rp 39.142.500,- atau 34,19% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecetan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Intalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja	

			Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecetan Taman Kantor	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit Realisasi 3 Unit atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp75.000.000,- terealisasi sebesar Rp 33.016.000,- atau 44,02%	
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100%	Jumlah anggaranTW II Rp 12.159.527.118,- terealisasi sebesar Rp 8.838.055.529,- atau 72,68	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan. Target 35 Stel. Belum terealisasi dikarenakan dilaksanakan di TW III	Jumlah anggaran Tw II Rp 693.240.000,- terealisasi sebesar Rp340.133.300,- atau 49,06%. (Utang pada Tahun 2024 dan di Bayarkan Pada Tahun 2025	Dilaksanakan di TW III
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 30 Orang Realisasi 0% dikarena Belum adanya KontraK atau MOU dengan Rumah Sakit Daerah	Jumlah anggaran Tw II Rp 60.000.000,- terealisasi sebesar 0 %. dikarena dikarena Belum adanya KontraK atau MOU dengan Rumah Sakit Daerah	Menunggu KontraK atau MOU dengan Rumah Sakit Daerah
10	Layanan Administrasi DPRD			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan /Perlengkapan Ruimah Tangga Yang Disediakan Target 3 Jenis Terealisasi 3 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 728.400.000,- terealisasi sebesar Rp515.681.345 atau 70,80 %.	
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indikator Capaian Kinerja :Untuk target pada Triwulan II berjumlah 3 (tiga) buah Ranperda. Dari ketiga Ranperda tersebut terdapat 1 (satu) buah Ranperda yang belum diserahkan oleh pihak Eksekutif yaitu Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan alasan bahwa Ranperda ini masih membutuhkan penjelasan dari Tenaga Ahlinya karena muatannya yang sangat mirip dengan Peraturan Pemerintah (sebagian besar hanya menyadur dari PP) walaupun sudah sempat dijawab oleh Tenaga Ahli, namun belum bisa diselesaikan saat Ranperda lain (TW II) diserahkan ke DPRD.	Jumlah anggaran Rp 187.837.200,- terealisasi sebesar Rp120,046,754,- atau 63,91 %.	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indikator Capaian Kinerja :Untuk target pada Triwulan II berjumlah 3 (tiga) buah Ranperda. Dari ketiga Ranperda tersebut terdapat 1 (satu) buah Ranperda yang belum diserahkan oleh pihak Eksekutif yaitu Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan alasan bahwa Ranperda ini masih membutuhkan penjelasan dari Tenaga Ahlinya karena muatannya yang sangat mirip dengan Peraturan Pemerintah (sebagian besar hanya menyadur dari PP) walaupun sudah sempat dijawab oleh Tenaga Ahli, namun belum bisa diselesaikan saat Ranperda lain (TW II) diserahkan ke DPRD. Namun ada 3 (tiga) buah Ranperda TW I yang difasilitasi di TW II (Ranperda tentang Desa, Ranperda Tentang Perangkat Desa dan Ranperda Perubahan BPD)	Jumlah anggaran Rp 754,167,600- terealisasi sebesar Rp 531.418.303 atau 72,17 %.	
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	Pembahasan KUA dan PPAS			Dilaksanakan Pada TW II

	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS			Dilaksanakan Pada TW II
	Pembahasan APBD			Dilaksanakan Pada TW IV
	Pembahasan APBD Perubahan			Dilaksanakan Pada TW III
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Hukum Target TW II 1 dokumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 633.611.700 terealisasi sebesar Rp 550073608,- atau 86,82%%	
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Bidang Infastruktur Target TW II, 1 dokumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaranTW II Rp686.540.950,- terealisasi sebesar Rp 657.569.966,- atau 95,78 %.	
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Target TW II, 1 dokumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 617.985.800,- terealisasi sebesar Rp 573.570.891,- atau 92,81%.	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indikator capaian kinerja : Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Target TW II, 3 dokumen dan Terealisasi 3 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp203.166.900- terealisasi sebesar Rp 141.162.386,- atau 68,48%.	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Indikator capaian kinerja : Jumlah Rekomendasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Target TW II, 3 dokumen dan Terealisasi 3 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 213.943.3000,- terealisasi sebesar Rp 142.609.450,- atau 66,66%.	

14	Peningkatan Kapasitas DPRD			
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD dengan target 1 kali realisasi 1 kali atau 100% (Bimtek diselenggarakan oleh Partai Politik)	Jumlah anggaran TW I Rp 467.800.425,- terealisasi sebesar Rp 69.619.458,- atau 14.88%.	
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar Dan Tim Ahli Yang disediakan target : 1 oarng dan terealisasi 1 orang atau 0 (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan)	Jumlah anggaran TW I Rp 48.731.000,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0%. (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan)	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi. Target 6 Orang Realisasi 6 atau 100%. (Disediakan berdasarkan Usulan dari Fraksi	Jumlah anggaran TW I Rp 52.500.000,- terealisasi sebesar Rp 35.000.000,-	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II
	Penyusunan Program Kerja DPRD			Dilaksanakan TW III
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah anggaran TW I Rp 40.007.150- terealisasi sebesar Rp 6.674.600,- Atau 16,68%	
-	Pelaksanaan Reses			
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD. Target 3 kali terealisasi 1 kali atau 33.33%	Jumlah anggaran TW I Rp 47.879.000,- terealisasi sebesar Rp 11.360.000,- Atau 30.04%	
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah			

	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasikan. Target 27 Laporan Realisasi 27 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 408.213.000,- terealisasi sebesar Rp 44.946.500,- Atau 11,01%	
18	Fasilitasi Tugas DPRD			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan	Jumlah anggaran TW I Rp 797.440.500,- terealisasi sebesar Rp 257.338.881,- Atau 32,27%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi. Target 3 kali terealisasi 3 laporan atau 100%, dikarenakan Perubahan Jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah	Jumlah anggaran Rp 14.824.500,- terealisasi sebesar Rp8.800.000,- atau 59,36 %. (Perubahan Jadwal akan berimplikasi dengan jumlah rapat yang akan dilaksanakan.	Jumlah rapat agar disesuaikan dengan jumlah anggaran.

NO	PROGRAM/KEGIA TAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN I (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)
					(6/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.212.633.302	10.034.327.764,00	7.766.881.505,00	77,40	22.594.248.752,00	77,34	
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.798.550	13.731.700,00	5.340.700	38,89	57.457.850,00	91,50	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.197.850	9.100.000,00	5.340.700	58,69	34.857.150,00	86,71	Terdapat Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor,Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Coverdan Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer yg belum terealisasi

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.973.000			-	5.973.000,00	100,00	Dilaksanakan Pada TW III
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.973.000			-	5.973.000,00	100,00	Dilaksanakan Pada TW III
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.558.900	4.631.700		-	11.558.900,00	100,00	
02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	4.013.272.630	1.390.514.755	993.846.279	71,47	3.019.426.351,00	75,24	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.926.248.730	1.374.187.055	979.410.579	71,27	2.946.838.151,00	75,05	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	87.023.900	16.327.700	14.435.700	88,41	72.588.200,00	83,41	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.093.850	16.520.600,00	11.870.100	71,85	12.223.750,00	50,73	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.093.850	16.520.600	11.870.100	71,85	12.223.750,00	50,73	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.744.550	451.820.000,00	255.645.570	56,58	326.098.980,00	56,06	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	357.780.000	241.820.000	154.850.000	64,04	202.930.000,00	56,72	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	223.964.550	210.000.000	100.795.570	48,00	123.168.980,00	54,99	
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.643.296.000	1.444.112.518,00	1.138.175.871	78,81	505.120.129,00	30,74	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.425.000	26.568.765	23.365.500	87,94	12.059.500,00	34,04	Jumlah anggaran TW 3 Rp 26.568.765,- terealisasi sebesar Rp 23.365.500,- atau 87,94%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% yang telah di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD

11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.500.000	65.500.000	63.100.000	96,34	2.400.000,00	3,66	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.142.000	5.137.000	3.530.000	68,72	3.612.000,00	50,57	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.009.700	112.312.275	57.034.000	50,78	79.975.700,00	58,37	Jumlah anggaran TW 3 Rp 112.312.275,- terealisasi sebesar Rp 57.034.000,- atau 50,788%. (di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi di tw III, rincian objek belanja tersebut yaitu : Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya (tenda) Rp15.750.000, Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat Rp4.200.000 dan Belanja Sewa Alat Studio Lainnya Rp18.000.000
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.747.300	245.560.475	166.097.050	67,64	94.650.250,00	36,30	Jumlah anggaran TW 3 Rp 245.560.475,- terealisasi sebesar Rp 166.097.050,- atau 67,54%. Capaian Realisasi Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	247.900.000	187.300.000	156.000.000	83,29	91.900.000,00	37,07	Jumlah anggaran TW 3 Rp 187.300.000,- terealisasi sebesar Rp 156.000.000,- atau 83,29%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	261.992.000	229.734.003	152.312.200	66,30	109.679.800,00	41,86	Jumlah anggaran TW 3 Rp 229.734.003,- terealisasi sebesar Rp 152.312.200,-

								atau 66,30%. Terdapat sisa belanja Makan Minum Tamu Hari Besar Keagamaan
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	627.580.000	572.000.000	516.737.121	90,34	110.842.879,00	17,66	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.147.950.000	2.147.950.000,00	1.003.091.598,15	46,70	1.144.858.401,85	53,30	
19	Pengadaan Mebel	534.750.000	534.750.000	427.900.000,00	80,02	106.850.000,00	19,98	Jumlah anggaran TW 2 Rp 534.750.000,- terrealisasi sebesar Rp357.900.000,- atau 66,93%. (masih terdapat rincian objek belanja yang belum terrealisasi yaitu : Belanja Modal Mebel (Pengadaan Meja Rapat Pimpinan Ruang Paripurna) Rp 70.000.000, (Masih tahap Pengerjaan) dan Belanja Modal Meja Rapat Pejabat (Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 10 unit) Rp 80.000.000).
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.527.500.000	1.527.500.000	489.941.598,15	32,07	1.037.558.401,85	67,93	Jumlah anggaran TW III Rp1.527.500.000,- terrealisasi sebesar Rp 489.941.598,15,- Dikarenakan kegiatan tersebutmasih dalam proses Kontruksi
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.700.000	85.700.000	85.250.000,00	99,47	450.000,00	0,53	Selesai
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.469.100	631.601.825,00	543.367.005	86,03	335.102.095,00	38,15	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.429.100	38.571.825	26.584.000	68,92	24.845.100,00	48,31	Jumlah anggaran TW 3 Rp 38.571.825,- terrealisasi sebesar Rp 17.739.500,-

								atau 61,71%. Terdapat rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos yang terealisasi di TW IV
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	500.040.000	375.030.000	299.283.005	79,80	200.756.995,00	40,15	Jumlah anggaran TW 3 Rp 375,030.000- terealisasi sebesar Rp 299.283005- atau 79,80%. untuk sub kegiatan ini bersifat disediakan karena sifatnya variabel
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.000.000	218.000.000	217.500.000	99,77	109.500.000,00	33,49	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.280.000	476.434.973,00	233.068.100	48,92	434.211.900,00	65,07	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.700.000	122.775.003	75.676.100	61,64	88.023.900,00	53,77	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.580.000	106.160.000	33.860.000	31,90	105.720.000,00	75,74	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 31,90% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD

27	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000			#DIV/0 !	54.000.000,00	100,00	TW IV
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	150.000.000	55.758.000	37,17	124.242.000,00	69,02	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 15,84% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecetan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Instalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecetan Taman Kantor
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	97.499.970	67.774.000	69,51	62.226.000,00	47,87	
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.795.677.175	13.922.410.217,00	13.279.701.802	95,38	4.515.975.373,00	25,38	
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.041.897.175	13.216.630.217	12.803.785.402	96,88	4.238.111.773,00	24,87	
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	543.780.000	543.780.000	388.880.000	71,51	154.900.000,00	28,49	
32	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000	162.000.000	87.036.400	53,73	122.963.600,00	58,55	Jumlah anggaran Tw III Rp 162.000.000,- terealisasi sebesar 87.036.400 atau 53,74%. dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.

10	Layanan Administrasi DPRD	1.248.000.000	936.000.000,00	832.000.000	88,89	416.000.000,00	33,33	
34	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.248.000.000	936.000.000	832.000.000	88,89	416.000.000,00	33,33	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.903.779.061	16.830.712.898,00	12.948.394.301	76,93	5.610.556.080,00	31,34	
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.702.699.086	2.651.257.288,00	2.481.170.419	93,58	221.528.667,00	8,20	
35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	550.657.500	549.215.700	508.655.750	92,61	42.001.750,00	7,63	
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.152.041.586	2.102.041.588	1.972.514.669	93,84	179.526.917,00	8,34	
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.323.654.550	1.323.654.550,00	195.500.863	14,77	1.128.153.687,00	85,23	
37	Pembahasan KUA dan PPAS	93.142.650	93.142.650	26.156.980	28,08	66.985.670,00	71,92	Jumlah anggaran TW III Rp 93.142.650 ,- terealisasi sebesar Rp26.156.980,- atau 28,08%. Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	112.495.800	112.495.800	18.852.835	16,76	93.642.965,00	83,24	Sub Kegiatan ini telah di laksanakan.Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran

39	Pembahasan APBD	378.710.900	378.710.900		-	378.710.900,00	100,00	Dilaksanakan Pada TW IV
40	Pembahasan APBD Perubahan	379.991.500	379.991.500	65.500.563	17,24	314.490.937,00	82,76	Sub Kegiatan ini telah di laksanakan.Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	359.313.700	359.313.700	84.990.485	23,65	274.323.215,00	76,35	Jumlah anggaran TW III Rp 359.313.700 ,- terealisasi sebesar Rp 84.990.485,- atau 23,6%. .Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.777.079.325	5.777.079.325,00	5.362.137.042	92,82	414.942.283,00	7,18	
42	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.608.204.300	1.608.204.300	1.496.612.070	93,06	111.592.230,00	6,94	
43	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	1.884.465.425	1.884.465.425	1.760.365.965	93,41	124.099.460,00	6,59	
44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	1.711.571.800	1.711.571.800	1.631.600.709	95,33	79.971.091,00	4,67	
45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	278.782.700	278.782.700	242.745.490	87,07	36.037.210,00	12,93	

46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	294.055.100	294.055.100	230.812.808	78,49	63.242.292,00	21,51	
04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.189.120.000	1.864.119.010	1.070.856.250	57,45	1.118.263.750,00	51,08	
47	Pendalaman Tugas DPRD	1.757.588.500	1.557.038.510	869.856.250	55,87	887.732.250,00	50,51	Tidak ditarget pada TW III oleh karena masa transisi oleh Anggota periode 2019-2024 ke periode 2024-2029
48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	133.221.000	113.770.000	30.000.000	26,37	103.221.000,00	77,48	Disdiakan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	189.000.000	168.000.000	88,89	126.000.000,00	42,86	Jumlah Tenaga ahli dari masing-masing fraksi yang terbentuk pasca pelantikan Dewan : 1. Fraksi PDI-Perjuangan, 2. Fraksi Dasdem, 3. Fraksi Pan, 4. Fraksi Golkar, 5. Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	4.310.500	4.310.500	3.000.000	69,60	1.310.500,00	30,40	Berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan, untuk penetapan renja akan dilaksanakan pada saat alat kelengkapan terbentuk
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.368.538.900	1.368.538.900	549.988.547	40,19	818.550.353,00	59,81	
51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	40.251.850	40.251.850	20.236.975	50,28	20.014.875,00	49,72	
52	Pelaksanaan Reses	1.328.287.050	1.328.287.050	529.751.572	39,88	798.535.478,00	60,12	
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77	16.865.200,00	35,23	
53	Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77	16.865.200,00	35,23	

07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.445.300.000	1.073.075.000	886.756.500	82,64	558.543.500,00	38,65	
54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.445.300.000	1.073.075.000	886.756.500,00	82,64	558.543.500,00	38,65	
08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.049.521.200	2.725.122.825	2.370.983.880	87,00	678.537.320,00	22,25	
55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.001.852.700	2.689.371.450	2.346.681.380,00	87,26	655.171.320,00	21,83	
56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	47.668.500	35.751.375	24.302.500,00	67,98	23.366.000,00	49,02	
		46.488.337.755	40.157.381.282	32.787.292.082,15	81,65	13.701.045.672,85	29,47	

Tabel 3.35

Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan , Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi
Perbaikan Pada Urusan Sekretariat DPRD TW I Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu target 2 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 1 sebesar Rp. 9.934.700,- Realisasi Keuangan Rp 5.340.700 atau 38,46% (Terdapat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Coverdan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yg belum terealisasi)	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II
		Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Jasa Tenaga administrasi yang terbayarkan setiab bulannya, target 2 orang terealisasi 2 orang atau 100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW II
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)		Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW II
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Target 10 Dokumen Terealisasi 3 dokumen atau 30 %		
2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Dengan target 27 Orang dan terealisasi 27 Orang atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp.1.374.187.055,- terealisasi sebesar Rp 979.410.579-, atau 71,21%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator : Jumlah Honorarium PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran Yang Terbayarkan Dengan target 2 Orang dan belum terealisasi dikarenakan menunggu SK	Jumlah anggaran TW I Rp16.327.700,- terealisasi sebesar Rp14.435.700-, atau 88,41%	
		Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu dengan target 10 laporan dan terealisasi 3 Dokumen atau 16.67%		

		Indikator : Jumlah Tenaga Upah Jasa Administrasi Keuangan Yang Terbayarkan Target sebanyak 3 Orang dan Terealisasi 3 Orang atau 100%		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun. Target 4 dokumen terealisasi 1 dok atau 25%	Jumlah anggaran TW I Rp5.538.525,- terealisasi sebesar Rp 0,-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang Dimutahirkan Target 4 dok. Realisasi 1 dok atau 25%	Jumlah anggaran TW I Rp 41.960.000,- terealisasi sebesar Rp31.800.000,- atau 75,797%.	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Target 27 Orang realisasi	Jumlah anggaran TW I Rp 113.964.550,- Belum terealisasi.	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target 9 Jenis realisasi 9 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 8.700.000,- terealisasi sebesar Rp5.193.000,- atau 59,69%.	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan .Target 5 Jenis. Belum terealisasi karena dilaksanakan di TW II		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target 2 Jenis terealisasi 2 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 2.025.000- terealisasi sebesar Rp750.000,- atau 37,4%.	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 2 jenis realisasi 2 jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp59.193.000,- terealisasi sebesar Rp 15.272.300,- atau 25,80%.	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan. Target 2 Jenis realisasi 2 jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp10.000.000,- terealisasi sebesar Rp5.345.450,- atau 53,43%.	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan. Target 2412 exp realisasi 603 exp atau 25%	Jumlah anggaran TW I Rp 61.975.000,- terealisasi sebesar Rp 40.000.000,- atau 64,54%.	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi (Orang) 12 laporan terealisasi 3 laporan atau 25%	Jumlah anggaran TW I Rp 53.677.000,- terealisasi sebesar Rp 15.762.000,- atau 29,36%.	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan	Jumlah anggaran TW I Rp 147.000.000- terealisasi sebesar Rp49.805.240,- atau 33,88%.	
		Jumlah Upah Jasa Sopir Yang Terbayarkan. Target 6 orang terealisasi 6 orang atau 100%		
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan		Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW II
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan. Target 4 Unit belum terealisasi, karena dilaksanakan di TW II		Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW II
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda. Target 3 Laporan dan Terealisasi 3 Laporan atau 100 %	Jumlah anggaran TW I Rp 13.176.200,- terealisasi sebesar Rp12.541.000,- atau 95,18%.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan. Target 9 Rek dan terealisasi 9 rek atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp125.010.000,- terealisasi sebesar Rp 94.322.844,- atau 75,45%.	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan. Target 21 Orang dan terealisasi 21 Orang atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 62.500.000,- terealisasi sebesar Rp 58.000.000,- atau 92,80%.	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Target 3 Unit dan terealisasi 3 Unit atau 36,36%	Jumlah anggaran TW I Rp 70.000.00- terealisasi sebesar Rp 6.377.500,- atau 9,11%. dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW II	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target 190 unit realisasi	Jumlah anggaran TW I Rp 24.930.000,- terealisasi sebesar Rp 11.2100.00,- atau 44,97%. dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW II	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Barang Milik daerah Yang Diasuransikan. Target 6 Unit dan belum terealisasi karena dilaksanakan di TW II		Sub Kegiatan ini dilaksanakan di TW IV
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 1 Unit realisasi 1 Unit atai 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 54.500.000,- terealisasi sebesar Rp 17.896.000,- atau 32,84%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 1 Unit Realisasi 1 Unit atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp50.000.00,- terealisasi sebesar Rp 17.141.000,- atau 34,28%	
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100%	Jumlah anggaran Rp 6.621.023.559,- terealisasi sebesar Rp 5.945.175.147,- atau 89,79	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan. Target 30 Stel belum terealisasi karena dilaksanakan di TW II	Jumlah anggaran Rp 693.240.000,- terealisasi sebesar Rp 234.700.000,- atau 33,89%. Dikarenakan pendaan pakaian dinas untuk thn 2025 ini dilaksanakan d TW II.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 30 Orang Realisasi 0% dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.	Jumlah anggaran Tw I Rp 60.000.000,- terealisasi sebesar 0 %. dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.	Akan dilakukan Penjadwalan ulang MCU d TW II
10	Layanan Administrasi DPRD			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan /Perlengkapan Ruimah Tangga Yang Disediakan Target 3 Jenis Terealisasi 3 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 320.400.000,- terealisasi sebesar Rp 203.903.045 atau 63,64 %.	
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			

	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan Target TW 6 Ranperda dan Terealisasi 5 Ranperda dikarenakan yang berproses ada 1 buah ranperda (Hari Ulang Tahun Lutim) yang ditarik kembali.	Jumlah anggaran Rp 60.748.537,- terealisasi sebesar Rp 4.810.000.atau 7,29 %. Di Jelaskan	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Raperda yang dibahas Target TW 6 Ranperda dan Terealisasi 5 Ranperda dikarenakan yang berproses ada 1 buah ranperda yang ditarik kembali.	Jumlah anggaran Rp 302.950.434,- terealisasi sebesar Rp 69.356.300 atau 22.89 %.	
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	Pembahasan KUA dan PPAS			Dilaksanakan Pada TW II
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS			Dilaksanakan Pada TW II
	Pembahasan APBD			Dilaksanakan Pada TW IV
	Pembahasan APBD Perubahan			Dilaksanakan Pada TW III
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Hukum Target TW I 1 dikumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 537.892.850 terealisasi sebesar Rp 423.174.908,- atau 78,67%	
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Bidang Infstruktur Target TW I 1 dikumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaranTW I Rp538.174.850,- terealisasi sebesar Rp 487.558.216,- atau 90,59 %.	
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Target TW I 1 dikumen dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 537.474.850,- terealisasi sebesar Rp 398.695.991,- atau 74,18%.	

	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Dilaksanakan di TW II
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			Dilaksanakan di TW II
14	Peningkatan Kapasitas DPRD			
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD dengan target 1 kali realisasi 1 kali atau 100% (Bimtek diselenggarakan oleh Partai Politik)	Jumlah anggaran TW I Rp 467.800.425,- terealisasi sebesar Rp 69.619.458,- atau 14.88%.	
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar Dan Tim Ahli Yang disediakan target : 1 orang dan terealisasi 1 orang atau 0 (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan)	Jumlah anggaran TW I Rp 48.731.000,- terealisasi sebesar Rp0,- atau 0%. (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan)	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi. Target 6 Orang Realisasi 6 atau 100%. (Disediakan berdasarkan Usulan dari Fraksi)	Jumlah anggaran TW I Rp 52.500.000,- terealisasi sebesar Rp 35.000.000,-	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II
	Penyusunan Program Kerja DPRD			Dilaksanakan TW III
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah anggaran TW I Rp 40.007.150,- terealisasi sebesar Rp 6.674.600,- Atau 16,68%	
-	Pelaksanaan Reses			
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD. Target 3 kali terealisasi 1 kali atau 33.33%	Jumlah anggaran TW I Rp 47.879.000,- terealisasi sebesar Rp 11.360.000,- Atau 30.04%	
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah			
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan Yang Dipublikasikan. Target 27 Laporan Realisasi 27 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW I Rp 408.213.000,- terealisasi sebesar Rp 44.946.500,- Atau 11,01%	
18	Fasilitasi Tugas DPRD			

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan	Jumlah anggaran TW I Rp 797.440.500,- terealisasi sebesar Rp 257.338.881,- Atau 32,27%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi. Target 3 kali terealisasi 3 laporan atau 100%, dikarenakan Perubahan Jadwal yang sewaktu-waktu dapat berubah	Jumlah anggaran Rp 14.824.500,- terealisasi sebesar Rp8.800.000,- atau 59,36 %. (Perubahan Jadwal akan berimplikasi dengan jumlah rapat yang akan dilaksanakan.	Jumlah rapat agar disesuaikan dengan jumlah anggaran.

BAB 4**PENUTUP****1.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 Sekretariat DPRD Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, bahwa capaian indikator utama sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2025
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	80

Capaian Indikator Kinerja Utama

Rata-rata nilai capaian indikator dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	100%	25%	20%	80%	Sangat Memuaskan
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100	0%	0%	0%	Belum Terlaksana
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	80.00	Belum dapat diukur karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)			

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan capaian kinerja utama di TW I tahun 2025 sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.992.959.352,- terealisasi sebesar Rp. **9.942.494.436,-** atau persentase capaian sebesar 21,61%.

1.2 Langkah Perbaikan Kinerja

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*)
3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Sekretariat DPRD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Sekretariat DPRD.

1.3 Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

1. Dukungan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.
2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Sekretariat DPRD.
3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang dianggap masih rendah.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan penyampaian informasi satu data.

1.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kinerja TW I pada Tahun 2025 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja TW I
Sekretariat DPRD
Tahun 2025**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/progres penyelesaian
1.	Agar Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Telah Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja	Sekretariat DPRD	selesai
2	Agar seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja selaras dengan perjanjian kinerja atasannya secara terstruktur dan lengkap dengan penjelasan operasional dan formulasi perhitungan	Telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja Perjanjian Kinerja dan SKP (kinerja individu).	Sekretariat DPRD	selesai
3	Melakukan Evaluasi berjenjang dan membuat laporan kinerja individu	Laporan Kinerja sudah dilakukan berjenjang mulai dari level staf hingga level Pimpinan yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja	Sekretariat DPRD	selesai

4	Melakukan Sosialisai/Rapat intern terkait perencanaan kinerja sehingga setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, tidak hanya dibebankan kepada sub bagian perencanaan tetapi tanggungjawab dari level pimpinan sampai dengan staf	Telah melakukan sosialisai/rapat intern setiap bulannya dan pertriwulan agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Sekretariat DPRD	selesai
5	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level dan melakukan evaluasi berjenjang sampai pada tingkat staf	Pengukuran kinerja telah dilakukan berjenjang berupa Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LKj) dari level staf, Kasubag, Kabag hingga Eselon 2 (Sekretais Dewan)	Sekretariat DPRD	selesai
6	Laporan Evaluasi Periodik dibuat berdasarkan Permenpan 53 tahun 2014	Sistematika Penyusunan LAKIP sudah berdasarkan pada BAB III Permen PAN&RB Nomor 5 53 Tahun 2014	Sekretariat DPRD	selesai
7	Penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan	Sekretariat DPRD	selesai





LAMPIRAN















